

## Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Wonogiri

Pandam Bayu Seto Aji<sup>1\*</sup>  
Universitas Negeri Semarang<sup>1</sup>  
Email : [ajik0204@students.unnes.ac.id](mailto:ajik0204@students.unnes.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerapan *good governance* berbasis reformasi birokrasi, dan *E-government* dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa teknik deskriptif analitis yang dijelaskan atau dibahas secara deskriptif dan didasarkan pada tinjauan literatur yang relevan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang diambil dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah dan kumpulan buku. Instrumen yang digunakan berupa data sekunder yang diacu dari tinjauan Pustaka yang relevan. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Wonogiri melakukan reformasi birokrasi berbasis kontrak kerja dimana penyelenggara pemerintahan seperti kepala daerah, selalu dituntut untuk mencapai target kerja yang telah di tentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penerapan reformasi birokrasinya untuk mencapai *good governance* pemerintah Kabupaten Wonogiri menggunakan konsep kontrak kerja berjalan baik dengan *output* berupa evaluasi kerja menggunakan konsep kontrak kerja yang memanfaatkan teknologi (*e-government*) sehingga dapat lebih transparan. Hal ini dibuktikan dari beberapa aspek, seperti penggunaan *e-government* terkait dengan pembentukan praktik tata kelola yang baik, pelaksanaan *good governance* terkait dengan reformasi kelembagaan birokrasi, terdapat hubungan antara kinerja dan *electronic government*, kinerja dengan reformasi birokrasi, dan penerapan *good governance* dengan kinerja.

**Kata Kunci:** E-Government, Government, Kinerja, Reformasi Birokrasi

### Abstrak

*Therefore, this study aims to determine the relationship between the implementation of good governance based on bureaucratic reform, and E-government in order to improve the efficiency of government administration in the city of Wonogiri. This research also uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of descriptive analytical techniques that are explained or discussed descriptively and based on relevant literature reviews by studying and collecting data taken from articles published in various scientific journals and book collections. The instrument used is secondary data referenced from the relevant literature review. In an effort to improve government administration, Wonogiri city conducts bureaucratic reforms based on work contracts where government administrators, such as regional heads, are always required to achieve predetermined work targets. The results of this study indicate that in the implementation of bureaucratic reform to achieve good governance, the Wonogiri city government uses the concept of work contracts to run well with the output in the form of work evaluation using the*

*concept of work contracts that utilize technology (e-government) so that it can be more transparent. This is evidenced from several aspects, such as the use of e-government related to the establishment of good governance practices, the implementation of good governance related to bureaucratic institutional reform, there is a relationship between performance and electronic government, performance with bureaucratic reform, and the implementation of good governance with performance.*

**Keywords:** *E-Government, Government, Performance, Bureaucratic Reform*

## **Pendahuluan**

Peran *good governance* dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat diupayakan melalui penerapan aturan (kebijakan) yang adil serta alokasi dan distribusi sumber daya secara adil. Untuk mencapai pemerintahan yang efektif, sangat penting bahwa proses partisipasi dan keterbukaan memfasilitasi penerapan akuntabilitas dalam pemerintahan (Munawir, 2011). Menurut (Mardiasmo, 2002) mendefinisikan “*good governance*” sebagai “sebuah konsep pendekatan yang bertujuan untuk pengembangan sektor publik melalui *good governance*”. Tata kelola yang baik juga dikenal sebagai "tata kelola sektor publik."

Selain itu, berikut kutipan dari Bank Dunia (Wahab, 2002): “*Good governance* adalah konsep pelaksanaan manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi investasi yang langka dan mencegah korupsi politik dan administrasi, menerapkan disiplin fiskal dan menciptakan kerangka hukum dan *political framework* untuk pertumbuhan wiraswasta.” Partisipasi dan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan frasa transparansi. Inilah tiga dasar *good governance*. Prinsip ini harus dipatuhi oleh semua entitas pemerintah, karena transparansi yang baik cenderung diikuti dengan meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah, yang pada gilirannya menyebabkan partisipasi publik yang lebih besar dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik (Munawir, 2011).

Eksistensi birokrasi merupakan prasyarat yang tak terhindarkan yang harus dipenuhi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan layanan kepada warganya sebagai sarana dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Birokrasi merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab menjalankan segala kebijakan yang terkait dengan kepentingan rakyat dalam negara. Jika dijalankan dengan benar, birokrasi berpotensi menjadi alat yang meningkatkan baik efikasi maupun efisiensi kerja.

Di sisi lain, birokrasi sering disalahgunakan. Keberadaan birokrasi tidak membuat proses berjalan lebih cepat; justru memperlambat berbagai tindakan yang terjadi di

masyarakat. Belum lagi banyaknya pajak yang berbeda yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Walaupun pegawai birokrasi digaji dari “pajak” masyarakat, realitas pemerintahan saat ini justru menghadirkan birokrasi dalam sudut pandang yang negatif dan tidak memungkinkan untuk melayani masyarakat. Selain itu, aparat birokrasi seringkali menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Karena itu, perlu dilakukan perubahan birokrasi. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka menciptakan aparatur negara agar dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan secara umum dan pembangunan nasional secara lebih efisien dan efektif (Dominata, 2013).

Tuntutan terwujudnya ketatanegaraan yang mampu mendukung kelancaran dan keseragaman pemenuhan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara dan pembangunan yang sejalan dengan praktik prinsip-prinsip *good governance* merupakan salah satu tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pembenahan birokrasi guna memenuhi persyaratan komponen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pemerintah. Tujuan mendasar dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih rasional (Mustopadidjaja, 2003).

Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan publik, yang harus terbuka untuk pengawasan publik, efektif dan efisien, dan mampu memenuhi persyaratan mendasar dari sistem peradilan. Pelibatan anggota masyarakat dalam semua tahap proses pengambilan keputusan merupakan komponen penting dari pemerintahan yang efektif (Hunja, 2009). Pemanfaatan internet untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat merupakan salah satu solusi yang dapat dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah praktik *e-government* yang dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir. *E-government* adalah sistem informasi administrasi elektronik yang membantu pemerintah dalam memberikan informasi, memberikan pelayanan publik, dan memfasilitasi transaksi online dengan instansi/usaha lain dan masyarakat umum dalam rangka meningkatkan tingkat pelayanan yang diterima semua aspek tersebut (Syailendra, 2009).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dijelaskan atau dibahas secara deskriptif dan naratif serta didasarkan pada tinjauan literatur yang relevan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang diambil dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah dan kumpulan buku. Penelitian ini juga menggunakan Teknik deskriptif analitis dengan menggunakan instrument

berupa data sekunder yang diambil dari tinjauan literatur yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penerapan *good governance* berbasis kontrak kerja, reformasi birokrasi, dan *E-governance* dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Keterkaitan Penerapan E-government Dengan Good Governance**

Pertama, peningkatan transparansi, informasi, dan akuntabilitas dapat dicapai melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan salah satu dari tiga cara agar teknologi informasi dan komunikasi dapat memperkuat tata *good governance*. Kedua, menciptakan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik (Magno & Serafica, 2001). Menurut temuan (Habib, 2007) ada korelasi yang menguntungkan antara pengenalan *e-government* dan upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan *good governance*. Dalam nada yang sama, temuan studi yang dilakukan oleh (Alaraj & Ibrahim, 2014) menunjukkan bahwa penerapan *e-government* memiliki dampak yang konstruktif dan nyata terhadap kualitas tata kelola.

Ada banyak penelitian tentang *e-government* yang meneliti teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk mengurangi pentingnya birokrasi di lembaga dan lembaga pemerintah (Cordella & Tempini, 2015). *E-procurement* yang juga dikenal sebagai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis web atau internet telah berhasil diterapkan di Indonesia, misalnya, berkat keputusan pemerintah untuk memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh implementasi *electronic government*. (*e-government*). Melalui Badan Pengadaan Secara Elektronik, instrumen ini memanfaatkan berbagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi (LPSE). Ini adalah langkah penting yang diambil pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang efektif (Zawani, 2012).

### **Keterkaitan Penerapan Reformasi dan Good governance**

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa. Pelaksanaan reformasi birokrasi menghasilkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai penopang utama perekonomian bangsa dan negara (Alfikri, 2012). Mengingat bahwa reformasi birokrasi

merupakan inti dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, keberhasilan implementasinya akan berdampak besar pada tercapainya tata kelola yang baik atau tidak (Gainau, 2013). Menurut kesimpulan penelitian (Mardiasmo, Diaswati, Barnes, H., & Yuka, 2008), ketiadaan perangkat legislatif untuk *good governance* sama dengan ketiadaan reformasi birokrasi.

Temuan ini konsisten dengan temuan penelitian. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Supriyatno, 2014) menunjukkan bahwa reformasi birokrasi pemerintahan merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan “*good governance*” yang dapat menjadifondasi bangsa yang modern dan maju.

(Lee, Hahn-Been; Samonte, 1970) mengusulkan reformasi administrasi (birokrasi) untuk mencapai pembangunan nasional dengan menerapkan berbagai ide baru dan memasukkannya ke dalam sistem administrasi. Menurut (Lee, Hahn-Been; Samonte, 1970), perubahan administratif (birokrasi) membutuhkan upaya bersama dan tindakan yang disengaja. Tindakan ini diambil untuk memajukan pembangunan nasional. secara positif. Modifikasi sistem untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional. Menghilangkan birokrasi yang tidak efektif merupakan prasyarat untuk mengembangkan pemerintahan yang sukses. Apalagi menurut (Minogue, 2002), reformasi dalam pemerintahan dan sektor publik dipandang sebagai reformasi yang saling mendukung dan melengkapi.

### **Keterkaitan Penerapan E-Government dan Kinerja**

Model *e-government* digunakan di hampir semua cabang pemerintahan, termasuk cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemanfaatan dapat dialami baik di dalam maupun di luar tubuh. Tujuannya jelas: *e-government*, dilihat dari dalam, harus dapat meningkatkan koordinasi di dalam pemerintahan; dilihat dari luar, seharusnya meningkatkan akses warga terhadap pelayanan publik; pada akhirnya, ini harus mengarah pada rasa demokratisasi yang lebih besar di antara masyarakat (Zawani, 2012). Dalam bentuknya yang paling dasar, *e-government* mengacu pada penerapan internet untuk menjalankan bisnis pemerintahan dan penyediaan layanan publik secara efisien dan lebih berpusat pada warga (Agustianto, 2012). Efektivitas aparatur berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diberikan; karenanya aparatur merupakan komponen esensial dari kemampuan pemerintah untuk memenuhi misinya melayani masyarakat (Kurniasih, Fidowaty, & Sukaesih, 2013).

Memanfaatkan *e-government* untuk penelitian kebijakan, memanfaatkan informasi yang diberikannya, dan memanfaatkan layanan yang diberikannya adalah tiga tujuan utama. Ada lima faktor yang dapat digunakan untuk memprediksi sejauh

mana *e-government* akan digunakan untuk tujuan tertentu. Ini adalah komponen psikologis dari adopsi teknologi, pemikiran kepentingan publik, outlet informasi, kepercayaan pemerintah, serta sifat sosio-demografis dan individu (Nam, 2014). Menurut kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh (Purnami, Syarbini, & Handayani, 2011), pengenalan *e-government* memiliki dampak besar pada kinerja staf. Kesimpulan ini didukung oleh temuan. Hasil penelitian (Kurniasih *et al.*, 2013) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-government* berdampak pada kinerja aparatur pemerintah yang menyumbang 54,85 persen dari total, sisanya 45,15 persen disebabkan oleh pengaruh dari faktor lainnya. Ini memberikan bukti empiris untuk mendukung gagasan bahwa ada korelasi positif antara kinerja pemerintah dan sejauh mana program e-government diimplementasikan secara efisien.

### **Keterkaitan Reformasi Birokrasi dan Kinerja**

Hubungan antara reformasi birokrasi dan kinerja, sebagaimana dikemukakan oleh (Turner & Hulme, 1997), menunjukkan bahwa reformasi birokrasi diperlukan dalam organisasi publik karena memiliki keterkaitan dengan kinerja. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi syarat mutlak. Menurut temuan penelitian (Aji, 2013), reformasi birokrasi secara parsial dan simultan memiliki dampak yang substansial terhadap kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan. Basis reformasi, agen reformasi, dan lingkungan adalah tiga jenis reformasi birokrasi yang memiliki dampak cukup luas di wilayahnya masing-masing. Sementara temuan penelitian (Wasita, 2014) menunjukkan bahwa ada pengaruh reformasi birokrasi terhadap kinerja organisasi, temuan ini tidak konklusif.

### **Keterkaitan Penerapan Good Governance dan Kinerja**

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh (Hikmah, Malisan, & Utomo, 2018), faktor dan prinsip *good governance* terbukti memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kinerja instansi pemerintah. Ini bisa dikatakan demikian. Selain itu, penerapan *good governance* terbukti memiliki pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nofianti & Suseno, 2014). Menurut (Yusuf, 2009) yang temuannya sejalan dengan dua penelitian sebelumnya, kinerja pemerintah daerah terbukti dipengaruhi oleh penerapan *good governance* sebesar 93,32 persen, sedangkan sisanya 6,68 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini sejalan dengan temuan dua penelitian sebelumnya. faktor. Menurut (Juliana, 2013) dan (Wasita, 2014), keduanya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang menguntungkan antara penerapan tata kelola yang baik dan kinerja organisasi, dapat dikatakan demikian. Hal ini didukung oleh fakta bahwa kedua penelitian ini menunjukkan

adanya korelasi antara keduanya. Hasil penelitian ini membawa kita pada kesimpulan bahwa ada hubungan antara keberhasilan penerapan praktik tata kelola yang baik dengan tingkat kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan.

### **Simpulan**

Setelah melakukan penelitian untuk menguji hipotesis yang diajukan pada pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan reformasi birokrasinya untuk mencapai *good governance* di pemerintah Kabupaten Wonogiri berjalan baik dengan *output* berupa evaluasi kerja dalam yang memanfaatkan teknologi (*e-government*) berjalan sehingga dapat lebih transparan. Hal ini dibuktikan dari beberapa aspek, seperti penggunaan *e-government* terkait dengan pembentukan praktik tata kelola yang baik, pelaksanaan *good governance* terkait dengan reformasi kelembagaan birokrasi, terdapat hubungan antara Kinerja dan *Electronic government*, terdapat hubungan Kinerja dengan Reformasi Birokrasi, dan terdapat hubungan antara penerapan *good governance* dengan kinerja. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran agar Pemerintahan Kabupaten Wonogiri dapat meningkatkan penggunaan *electronic government* dan pemanfaatan reformasi birokrasi supaya pelaksanaan *good governance* dan kinerjanya dapat lebih meningkat serta perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menerapkan tata kelola yang baik jika ingin melihat peningkatan kinerja yang lebih besar lagi.

### **Referensi**

- Agustianto, R. N. (2012). Dampak E-Government Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah.
- Aji, M. Q. W. (2013). *Dampak Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* (Universitas Pasundan). Universitas Pasundan. Retrieved from [http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28411%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/28411/3/Abstrac dan kata pengantar.docx](http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28411%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/28411/3/Abstrac%20dan%20kata%20pengantar.docx)
- Alaaraj, H., & Ibrahim, P. D. F. W. (2014). The Influence of E-government Practices on good governance from the perspective of Public in Lebanon. *Journal of Public Administration and Governance*, 4(3), 171. <https://doi.org/10.5296/jpag.v4i3.6405>
- Alfikri, I. (2012). Reformasi Birokrasi dan Good Government. Retrieved November 10, 2022, from Mahasiswa Universitas Brawijaya website:

- <http://blog.ub.ac.id/alfikri/2012/03/11/reformasi-birokrasi-dan-good-governance/> Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279–286. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.03.005>
- Dominata, A. (2013). Apa itu Reformasi Birokrasi? *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*. Retrieved from <http://u.lipi.go.id/1351657451>
- Elbahnasawy, N. G. (2014). E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation. *World Development*, 57, 114–126. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.005>
- Flynn, N. (1997). *Public Sector Management*. New York: Harvester Wheatsheaf. <https://doi.org/10.4337/9781781950494.00042>
- Gainau, A. W. (2013). Reformasi birokrasi di indonesia dalam perspektif perilaku. *Reformasi Birokrasi Di Indonesia Dalam Perspektif Perilaku*, 11(1), 11–20.